



## **Pengaruh Indikator Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada 10 Provinsi Miskin Di Indonesia 2015-2024**

Alma Alfina<sup>1</sup>, Asih Murwiati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung  
[almaalfina05@gmail.com](mailto:almaalfina05@gmail.com), [asih.murwiati@feb.unila.ac.id](mailto:asih.murwiati@feb.unila.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to examine the effect of inclusive economic growth indicators on the poverty rate in the 10 poorest provinces in Indonesia during 2015-2024. This research uses a quantitative approach with panel data covering 10 provinces over ten years of observation, yielding 100 observations. Data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis was conducted using panel data regression with the Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM) approaches. Based on the Chow Test, Hausman Test, and Lagrange Multiplier Test results, the Random Effect Model was selected as the best model and estimated using Cluster Robust Standard Error to address heteroskedasticity and autocorrelation problems. The results show that the labor force participation rate, education, and life expectancy significantly affect the poverty rate partially, while the Gini Ratio and GRDP per capita have no significant effect. Education and health variables are the most consistent factors in reducing poverty. The simultaneous test results show a Wald Chi-Square value of 3,489.63 with a probability of 0.0000, while the coefficient of determination ( $R^2$  Overall) of 0.5341 indicates that 53.41% of the variation in poverty rate can be explained by the variables in the model. These findings indicate that improving the quality of education and health is the most effective strategy for reducing poverty in Indonesia's lagging provinces, while income equality and economic growth alone are not yet sufficient to directly address the poverty problem.

**Keywords:** Poverty, Gini Ratio, Labor Force Participation Rate, Education, Health, GRDP Per Capita.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh indikator pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap tingkat kemiskinan pada 10 provinsi miskin di Indonesia 2015-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup 10 provinsi selama sepuluh tahun pengamatan sehingga menghasilkan 100 observasi. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, Random Effect Model terpilih sebagai model terbaik dan diestimasi menggunakan Cluster Robust Standard Error untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPAK, pendidikan, dan Angka Harapan Hidup berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara parsial, sedangkan Gini Rasio dan PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan. Variabel pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang paling konsisten dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil uji simultan menunjukkan nilai Wald Chi-Square sebesar 3.489,63 dengan probabilitas 0,0000, sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$  Overall) sebesar 0,5341 menunjukkan bahwa 53,41% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan strategi paling efektif dalam menurunkan kemiskinan di provinsi-provinsi tertinggal Indonesia, sedangkan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi semata belum cukup untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara langsung.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Gini Rasio, TPAK, Pendidikan, Kesehatan, PDRB Per Kapita.

### **1. Pendahuluan**

Kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural utama pembangunan Indonesia. Secara nasional, tingkat kemiskinan menurun dari 11,22 persen pada 2015 menjadi 8,57 persen pada Maret 2024, sempat terganggu oleh lonjakan sementara akibat pandemi COVID-19 pada 2020 (BPS, 2024; Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma, 2020). Namun, tren penurunan ini tidak merata, sepuluh provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan secara konsisten menempati posisi provinsi termiskin sepanjang 2015–2024, dengan kecepatan penurunan yang jauh bervariasi antar wilayah (BPS, 2024). Papua bahkan masih mencatat tingkat kemiskinan di atas 25 persen pada 2024, sementara provinsi seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah menunjukkan perbaikan yang lebih progresif. Pola stagnasi ini konsisten dengan teori jebakan kemiskinan geografis (geographic/spatial poverty trap), yang menjelaskan bahwa keterbatasan infrastruktur dan akses pasar suatu wilayah dapat menahan kesejahteraan penduduknya, terlepas dari karakteristik individu rumah tangga (Jalan dan

Ravallion, 2002), dan sejalan dengan temuan bahwa sebagian besar kemiskinan di Indonesia bersifat kronis, bukan fluktuasi sementara (Sugiharti, Purwono, Esquivias, dan Jayanti, 2022).

Variasi antarprovinsi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk menurunkan kemiskinan secara merata; dibutuhkan pertumbuhan yang bersifat inklusif, yaitu pertumbuhan yang mampu memperluas akses dan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Klasen, 2010; ADB, 2020). Kelima indikator yang mencerminkan hal yang telah disebutkan Gini Rasio, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Hidup (AHH), dan PDRB per kapita pada sepuluh provinsi termiskin menunjukkan pola yang saling melengkapi namun tidak konsisten satu sama lain: TPAK tertinggi (Papua, NTT, NTB) tidak diikuti penurunan kemiskinan yang proporsional; PDRB per kapita tertinggi (Papua Barat, > Rp131 juta pada 2024) tidak berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan, sementara provinsi dengan PDRB dan TPAK lebih rendah (Gorontalo, NTT, Maluku, Aceh) justru mencatat penurunan kemiskinan yang lebih stabil. Pola yang saling bertolak belakang ini menegaskan bahwa kelima indikator perlu diuji secara serentak dalam satu model, bukan parsial, untuk memahami mekanisme sesungguhnya di balik ketimpangan kemiskinan antarwilayah. Penelitian terdahulu mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif dan kemiskinan umumnya masih terbatas cakupannya. Sipota, Walewangko, dan Masloman (2024) menguji hubungan ini pada level kabupaten (Kepulauan Talaud), sedangkan Aimon, Kurniadi, dan Satrio (2020) membatasi analisis pada satu provinsi (Sumatera Barat) keduanya dengan unit analisis tunggal yang membatasi generalisasi lintas wilayah dengan karakteristik kemiskinan berbeda. Damayanti, Sasana, dan Prakoso (2023) menguji indikator inklusif secara serentak, tetapi hanya pada ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi saja, tanpa memasukkan dimensi ketenagakerjaan, pendidikan, atau kesehatan. Konsisten dengan temuan ini, kajian-kajian sejenis pada umumnya memilih model regresi data panel sederhana tanpa memperhitungkan potensi endogenitas antar indikator inklusif dan kemiskinan.

Dari pemetaan tersebut, teridentifikasi dua kesenjangan utama. Pertama, kesenjangan cakupan wilayah, belum ada kajian yang secara khusus memfokuskan sepuluh provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional sebagai kelompok analisis tersendiri, padahal kelompok ini memiliki karakteristik struktural (keterisolasian geografis, ketergantungan sektor primer) yang berbeda dari provinsi lain (Bappenas, 2020). Kedua, kesenjangan metodologis: mayoritas penelitian menguji indikator inklusif secara parsial atau pada rentang waktu pendek, sehingga belum menangkap dinamika hubungan antarvariabel pada tiga fase kondisi makroekonomi yang berbeda sebelum pandemi, saat guncangan pandemi, dan pasca pandemi (BPS, 2024; Bank Indonesia, 2023; WorldBank, 2023).

Penelitian ini mengisi kedua kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara serentak pengaruh Gini Rasio, TPAK, pendidikan, kesehatan, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan pada sepuluh provinsi termiskin di Indonesia selama periode 2015–2024, menggunakan regresi data panel dengan pengujian ketahanan model (cluster robust standard error) serta uji endogenitas (Mundlak test) untuk memastikan validitas estimasi. Pendekatan ini memberikan kebaruan pada cakupan unit analisis (kelompok provinsi termiskin secara nasional, bukan wilayah tunggal), kelengkapan indikator inklusif yang diuji secara simultan, serta ketahanan metodologis yang belum banyak diterapkan pada studi sejenis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Gini Rasio, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan PDRB per kapita, baik secara parsial maupun serentak terhadap tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi termiskin di Indonesia pada tahun 2015–2024.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel, yaitu gabungan data antara data time series (2015-2024) dan Cross Section (10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia). Total observasi dalam penelitian ini berjumlah 100 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder deret waktu (time series) tahunan periode 2015-2024 yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencakup enam variabel sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Daftar Variabel**

| No | Variabel                           | Satuan | Sumber | Tahun     |
|----|------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 1  | Kemiskinan                         | Persen | BPS    | 2015-2024 |
| 2  | Gini Rasio                         | Indeks | BPS    | 2015-2024 |
| 3  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | BPS    | 2015-2024 |
| 4  | Pendidikan (RLS)                   | Tahun  | BPS    | 2015-2024 |
| 5  | Kesehatan (AHH)                    | Tahun  | BPS    | 2015-2024 |
| 6  | Produk Domestik Regional Bruto     | Rupiah | BPS    | 2015-2024 |

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Variabel PDRB per kapita ditransformasi ke logaritma natural (LnPDRB) untuk menstabilkan varians akibat skala nilai yang jauh lebih besar dibanding variabel lain (Gujarati & Porter, 2009), variabel lainnya digunakan dalam satuan aslinya. Model regresi data panel dispesifikasikan sebagai berikut:

$$\text{Miskin}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Gini}_{it} + \beta_2 \text{TPAK}_{it} + \beta_3 \text{Pddkn}_{it} + \beta_4 \text{AHH}_{it} + \beta_5 \text{LnPDRB}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Estimasi dilakukan melalui tiga model standar regresi data panel, yaitu Common Effect Model (CEM/OLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM/GLS) dengan menggunakan perangkat lunak Stata 17. Model terbaik dipilih melalui Uji Chow (CEM vs FEM), Uji Hausman (FEM vs REM), dan Uji Lagrange Multiplier Breusch-Pagan (CEM vs REM), masing-masing pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Sebelum estimasi akhir, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (Skewness-Kurtosis Test), multikolinearitas (Variance Inflation Factor, ambang VIF < 10), heteroskedastisitas (Modified Wald Test for Groupwise Heteroskedasticity), dan autokorelasi (Wooldridge Test for Autocorrelation in Panel Data) (Wooldridge, 2002). Apabila terdeteksi heteroskedastisitas dan/atau autokorelasi, estimasi akhir menggunakan cluster robust standard error agar inferensi tetap valid (Baltagi, 2021). Untuk mendeteksi kemungkinan endogenitas antara efek individu provinsi dan variabel independen, dilakukan uji tambahan menggunakan pendekatan Mundlak (Correlated Random Effects). Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), meliputi uji parsial (uji z) untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara individual, uji serentak (Wald test) untuk menilai kelayakan model secara keseluruhan, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur proporsi variasi tingkat kemiskinan yang dijelaskan oleh model.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran karakteristik data penelitian yang terdiri atas 10 provinsi termiskin di Indonesia selama periode 2015-2024 dengan total 100 observasi. Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

| Variabel                  | Obs | Mean    | Std. Dev. | Min    | Max     |
|---------------------------|-----|---------|-----------|--------|---------|
| <b>Kemiskinan (%)</b>     | 100 | 17,3461 | 4,5196    | 10,51  | 28,40   |
| <b>Gini Ratio</b>         | 100 | 0,3561  | 0,0355    | 0,288  | 0,428   |
| <b>TPAK (%)</b>           | 100 | 69,3066 | 4,0371    | 60,18  | 79,57   |
| <b>Pendidikan (Tahun)</b> | 100 | 8,1214  | 0,9892    | 5,99   | 10,26   |
| <b>AHH (Tahun)</b>        | 100 | 67,6697 | 1,6947    | 65,135 | 70,975  |
| <b>LnPDRB</b>             | 100 | 10,5668 | 0,4784    | 9,6069 | 11,7878 |

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat variasi yang berbeda antarprovinsi. Variabel tingkat kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 17,34 persen dengan standar deviasi 4,52 yang mengindikasikan kesenjangan kondisi sosial ekonomi yang cukup tajam meskipun seluruh provinsi sampel tergolong provinsi termiskin secara nasional. Gini Rasio memiliki rata-rata 0,356 yang menurut kriteria Bank Dunia termasuk kategori ketimpangan sedang. Variabel pendidikan dan AHH memiliki standar deviasi yang relatif kecil, menunjukkan kondisi sumber daya manusia yang lebih homogen dibandingkan variabel ekonomi lainnya, sedangkan LnPDRB menunjukkan sebaran yang lebih lebar akibat kesenjangan kapasitas ekonomi daerah yang cukup besar antarprovinsi sampel.

#### 3.2 Pengujian Asumsi Klasik

**Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik**

| Uji                        | Probabilitas | Keterangan                  |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Normalitas</b>          | 0,2468       | Normal                      |
| <b>Multikolinearitas</b>   | 2,06         | Tidak ada multikolinearitas |
| <b>Heteroskedastisitas</b> | 0,0000       | Terjadi Heteroskedastisitas |
| <b>Autokorelasi</b>        | 0,0009       | Terjadi Autokorelasi        |

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa residual model berdistribusi normal dan model bebas dari masalah multikolinearitas, dengan nilai mean VIF jauh di bawah ambang batas 10. Namun demikian, ditemukan indikasi heteroskedastisitas dan autokorelasi, yang lazim terjadi pada data panel akibat perbedaan karakteristik ekonomi antarwilayah dan sifat data deret waktu yang berkelanjutan. Kedua pelanggaran asumsi ini ditangani melalui penggunaan cluster robust standard error pada tahap estimasi akhir.

#### 3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12872>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

**Tabel 4. Hasil Pemilihan Model**

| Uji                | Probabilitas | Keterangan |
|--------------------|--------------|------------|
| <b>Uji Chow</b>    | 0,0000       | FEM        |
| <b>Uji Hausman</b> | 0,9843       | REM        |
| <b>Uji LM</b>      | 0,0000       | REM        |

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Ketiga pengujian secara konsisten mengarah pada pemilihan Random Effect Model (REM) sebagai model terbaik untuk mengestimasi pengaruh Gini Rasio, TPAK, Pendidikan, AHH, dan LnPDRB terhadap tingkat kemiskinan pada sepuluh provinsi termiskin di Indonesia. Mengingat model mengandung heteroskedastisitas dan autokorelasi, estimasi akhir menggunakan REM dengan cluster robust standard error. Meskipun hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa REM lebih efisien dibandingkan FEM ( $\text{Prob} > \text{Chi}^2 = 0,9843$ ), nilai rho sebesar 0,9804 pada model REM juga mendorong pengujian tambahan melalui Mundlak Variable Addition Test ( $\text{Chi}^2(5) = 1,29$ ;  $\text{Prob} = 0,9361$ ), yang tidak menemukan indikasi korelasi antara efek individu provinsi dengan variabel independen, sehingga asumsi utama REM tetap terpenuhi.

### 3.4 Hasil Estimasi Random Effect Model

**Tabel 5. Hasil Estimasi Random Effect Model dengan Cluster Robust Standard Error**

| Variabel                | Koefisien | z-statistik | z-statistik | Prob. | Kesimpulan       |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|------------------|
| <b>Gini Ratio</b>       | 4,2182    | 0,58        | 0,58        | 0,561 | Tidak Signifikan |
| <b>TPAK</b>             | 0,0899    | 2,32        | 2,32        | 0,021 | Signifikan       |
| <b>Pendidikan (RLS)</b> | -1,5130   | -2,75       | -2,75       | 0,006 | Signifikan       |
| <b>AHH</b>              | -0,8424   | -2,09       | -2,09       | 0,036 | Signifikan       |
| <b>LnPDRB</b>           | -0,3679   | -0,66       | -0,66       | 0,508 | Tidak Signifikan |
| <b>Konstanta</b>        | 82,7940   | 4,18        | 4,18        | 0,000 | Signifikan       |

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Nilai koefisien menunjukkan bahwa pendidikan dan AHH berpengaruh negatif dan signifikan, TPAK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Gini Rasio dan LnPDRB tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Di antara variabel yang signifikan, pendidikan memiliki koefisien absolut terbesar, yang mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan merupakan faktor paling dominan dalam menurunkan kemiskinan pada sepuluh provinsi termiskin di Indonesia.

### 3.5 Uji Hipotesis Statistik

#### 3.5.1 Uji z (Parsial)

**Tabel 6. Hasil Uji z**

| Variabel                | Koefisien | z-statistik | Prob  | Keterangan                      |
|-------------------------|-----------|-------------|-------|---------------------------------|
| <b>Gini Ratio</b>       | 4,2182    | 0,58        | 0,561 | Tidak Signifikan                |
| <b>TPAK</b>             | 0,0899    | 2,32        | 0,021 | Signifikan, Arah Berlawanan (+) |
| <b>Pendidikan (RLS)</b> | -1,5130   | -2,75       | 0,006 | Signifikan (-)                  |
| <b>AHH</b>              | -0,8424   | -2,09       | 0,036 | Signifikan (-)                  |
| <b>LnPDRB</b>           | -0,3679   | -0,66       | 0,508 | Tidak Signifikan                |

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Hasil uji z pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel pendidikan, AHH, dan TPAK memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sedangkan Gini Rasio dan LnPDRB memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak seluruh variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada sepuluh provinsi termiskin di Indonesia periode 2015–2024, berbeda dengan pola pada studi determinan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal yang umumnya menunjukkan seluruh variabel signifikan secara konsisten.

Variabel pendidikan memiliki nilai z-statistik sebesar -2,75 dengan probabilitas 0,006. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah secara konsisten menurunkan tingkat kemiskinan, sejalan dengan teori modal manusia yang menekankan peran investasi pendidikan dalam meningkatkan produktivitas individu.

Variabel AHH memperoleh z-statistik sebesar -2,09 dengan probabilitas 0,036. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbaikan derajat kesehatan masyarakat berasosiasi dengan penurunan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan penurunan beban ekonomi rumah tangga.

Variabel TPAK memiliki nilai z-statistik sebesar 2,32 dengan probabilitas 0,021, signifikan secara statistik namun dengan arah pengaruh positif, berlawanan dengan dugaan awal bahwa partisipasi kerja yang lebih tinggi akan menurunkan kemiskinan. Temuan ini disampaikan secara objektif sebagai hasil yang berlawanan arah dengan hipotesis, dan akan diuraikan lebih lanjut pada bagian pembahasan.

Variabel Gini Rasio dan LnPDRB masing-masing memiliki probabilitas 0,561 dan 0,508, keduanya tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi secara langsung terhadap kemiskinan pada kelompok provinsi ini tidak dapat dibuktikan secara empiris.

### 3.5.2 Uji Wald (Serentak)

**Tabel 7. Hasil Uji Serentak (Wald Chi-Square Test)**

| Statistik               | Nilai    |
|-------------------------|----------|
| Wald Chi-Square         | 3.489,63 |
| Prob > Chi <sup>2</sup> | 0,0000   |

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Hasil Uji Serentak Wald pada Tabel 5 menunjukkan nilai Chi-Square sebesar 3.489,63 dengan probabilitas 0,0000, jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa Gini Rasio, TPAK, pendidikan, AHH, dan LnPDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada sepuluh provinsi termiskin di Indonesia selama periode penelitian, sehingga model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan tingkat kemiskinan, sekalipun tidak semua variabel signifikan secara parsial.

### 3.5.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 8. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

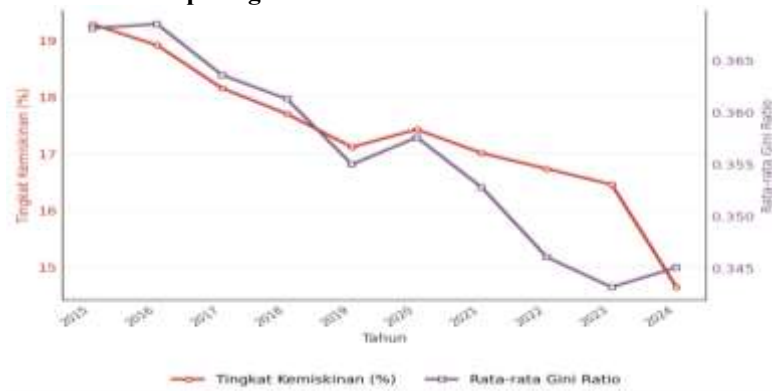
| Jenis R <sup>2</sup>   | Nilai  | Interpretasi                                                 |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| R <sup>2</sup> Within  | 0,8548 | 85,48% variasi kemiskinan dalam provinsi dari waktu ke waktu |
| R <sup>2</sup> Between | 0,5001 | 50,01% variasi kemiskinan antarprovinsi                      |
| R <sup>2</sup> Overall | 0,5341 | 53,41% variasi kemiskinan secara keseluruhan                 |

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari estimasi Random Effect Model terdiri atas tiga ukuran, yaitu R<sup>2</sup> Within sebesar 0,8548, R<sup>2</sup> Between sebesar 0,5001, dan R<sup>2</sup> Overall sebesar 0,5341. Nilai R<sup>2</sup> Overall menunjukkan bahwa 53,41 persen variasi tingkat kemiskinan pada sepuluh provinsi termiskin selama 2015–2024 dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen dalam model, sedangkan 46,59 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti tingkat pengangguran terbuka, realisasi belanja perlindungan sosial, kualitas infrastruktur, dan tata kelola daerah, yang tidak diikutsertakan karena keterbatasan ketersediaan data sekunder yang konsisten pada level provinsi. Nilai R<sup>2</sup> Within yang jauh lebih tinggi dibandingkan R<sup>2</sup> Between konsisten dengan nilai rho sebesar 0,9804, yang menunjukkan bahwa model ini lebih kuat dalam menjelaskan dinamika kemiskinan dari waktu ke waktu pada tiap provinsi dibandingkan menjelaskan perbedaan kemiskinan antarprovinsi.

## 3.6 Pembahasan

### 3.6.1 Pengaruh Gini Rasio terhadap Tingkat Kemiskinan



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Gambar 1 Perbandingan Rata-rata Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sampel Tahun 2015-2024. Hasil estimasi Random Effect Model menunjukkan bahwa Gini Rasio memiliki koefisien positif sebesar 4,2182 namun tidak signifikan secara statistik ( $p = 0,561$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme ketimpangan-kemiskinan tidak bekerja secara langsung pada sepuluh provinsi termiskin di Indonesia, sejalan dengan pandangan bahwa pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di banyak wilayah Indonesia bersifat tidak langsung dan baru tampak nyata apabila disertai keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak secara bersamaan. Gambar 1 memperlihatkan bahwa rata-rata Gini Rasio dan tingkat kemiskinan pada provinsi sampel sama-sama menunjukkan tren menurun sepanjang 2015–2024, meskipun pola pergerakannya tidak selalu berhimpit erat. Kesamaan arah tren pada grafik perlu dibedakan dari hasil uji statistik, karena grafik menyajikan hubungan bivariat sederhana, sedangkan estimasi regresi mengukur pengaruh Gini Rasio secara ceteris paribus.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12872>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

setelah mengontrol variabel lain. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan pada kelompok provinsi ini kemungkinan besar bukan penyebab utama kemiskinan, melainkan gejala yang menyertai keterbatasan struktural lain yang lebih dominan.

Temuan ini sejalan dengan Akhmadi (2019) yang menemukan bahwa di banyak wilayah Indonesia, pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan sering kali bersifat tidak langsung dan baru terlihat nyata apabila disertai keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak secara bersamaan, bukan semata dari besaran Gini Rasio itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan Afriliana dan Wahyudi (2022) dalam studi komparasi pertumbuhan ekonomi inklusif antarprovinsi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat ketimpangan relatif serupa dapat memiliki capaian penurunan kemiskinan yang sangat berbeda, bergantung pada sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah tersebut disertai perluasan akses layanan dasar. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan pada kelompok provinsi ini kemungkinan besar bukan penyebab utama kemiskinan, melainkan gejala yang menyertai keterbatasan struktural lain yang lebih dominan.

### 3.6.2 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Kemiskinan



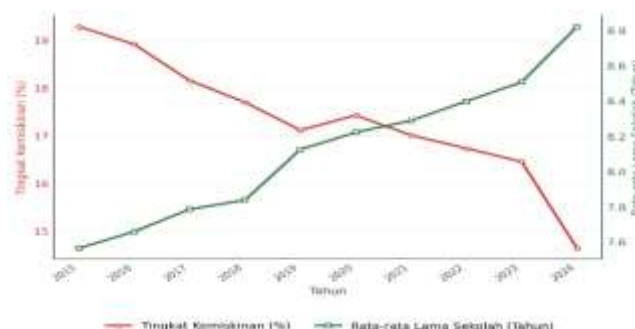
Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Gambar 2 Perbandingan Rata-rata TPAK dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sampel Tahun 2015-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar 0,0899 dan probabilitas 0,021, berlawanan arah dengan hipotesis yang menduga pengaruh negatif. Setiap kenaikan TPAK satu persen berasosiasi dengan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,0899 persen (ceteris paribus). Gambar 2 memperlihatkan bahwa rata-rata TPAK pada provinsi sampel cenderung meningkat sepanjang 2015–2024, bergerak searah, bukan berlawanan arah, dengan penurunan tingkat kemiskinan, pola bivariat inilah yang tercermin pada koefisien regresi yang positif. Temuan ini pada pandangan pertama tampak berlawanan dengan intuisi ekonomi standar, tetapi dapat dijelaskan melalui konsep *working poor*, yaitu kondisi ketika peningkatan partisipasi kerja tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas maupun kualitas pekerjaan yang memadai. Pada provinsi-provinsi termiskin yang menjadi sampel penelitian ini, tingginya TPAK kemungkinan besar didorong oleh kebutuhan ekonomi rumah tangga yang mendesak anggota keluarga bekerja di sektor informal berproduktivitas rendah, bukan oleh tersedianya lapangan kerja formal yang produktif, sehingga tingginya partisipasi kerja lebih mencerminkan strategi bertahan hidup rumah tangga miskin dibandingkan indikator perbaikan kesejahteraan. Hasil ini disajikan secara objektif sebagai temuan yang berlawanan dengan hipotesis awal penelitian.

Fields (2019) menegaskan bahwa dalam pasar tenaga kerja negara berkembang, kualitas pekerjaan (*job quality*) jauh lebih menentukan kesejahteraan pekerja dibandingkan sekadar status bekerja atau tidak bekerja. Kondisi ini konsisten dengan Manning dan Pratomo (2013) yang menemukan bahwa tingginya partisipasi angkatan kerja di wilayah dengan keterbatasan struktural sering kali mencerminkan strategi bertahan hidup (*survival strategy*) rumah tangga miskin, bukan indikator perbaikan kesejahteraan. Febriandika, Rahayu, dan Kumar (2022) dalam kajiannya terhadap determinan kemiskinan di 12 provinsi Kawasan Timur Indonesia turut menemukan pola serupa, yaitu bahwa indikator ketenagakerjaan agregat tidak selalu berasosiasi negatif dengan kemiskinan apabila struktur lapangan kerja daerah masih didominasi sektor informal dan pertanian subsisten. Hasil ini disajikan secara objektif sebagai temuan yang berlawanan dengan hipotesis awal penelitian.

### 3.6.3 Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Gambar 3 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sampel Tahun 2015-2024 Pendidikan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar -1,5130 dan probabilitas 0,006. Nilai z-statistik tertinggi di antara seluruh variabel menjadikan pendidikan sebagai determinan yang paling konsisten dalam penelitian ini. Setiap peningkatan rata-rata lama sekolah satu tahun berasosiasi dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,513 persen (*ceteris paribus*), sejalan dengan teori modal manusia yang menegaskan bahwa investasi pendidikan meningkatkan produktivitas individu melalui akumulasi keterampilan dan pengetahuan sehingga memperbesar peluang memperoleh pekerjaan dengan pendapatan layak. Gambar 3 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah pada provinsi sampel meningkat secara konsisten sepanjang periode penelitian, seiring dengan tren penurunan tingkat kemiskinan, pola pergerakan berlawanan arah yang memperkuat hasil estimasi regresi. Temuan ini menegaskan urgensi investasi pendidikan di provinsi-provinsi termiskin Indonesia sebagai salah satu strategi paling efektif dalam pengentasan kemiskinan jangka panjang.

Todaro dan Smith (2011) memperkuat temuan ini dengan menekankan bahwa pendidikan berperan sebagai mekanisme utama pemutus rantai kemiskinan antargenerasi, karena penduduk dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi, teknologi, dan peluang ekonomi formal. Konsistensi arah pengaruh ini juga ditemukan oleh Nabilawaty dan Hutajulu (2015) dalam analisis determinan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menemukan bahwa pendidikan secara konsisten menjadi salah satu variabel dengan pengaruh negatif paling stabil terhadap kemiskinan dibandingkan variabel ekonomi makro lainnya. Temuan ini menegaskan urgensi investasi pendidikan di provinsi-provinsi termiskin Indonesia sebagai salah satu strategi paling efektif dalam pengentasan kemiskinan jangka panjang.

#### 3.6.4 Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Gambar 4 Perbandingan Rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sampel Tahun 2015-2024

AHH sebagai proksi kondisi kesehatan masyarakat terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,8424 dan probabilitas 0,036. Setiap peningkatan AHH satu tahun berasosiasi dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,8424 persen (*ceteris paribus*), konsisten dengan kerangka pembangunan manusia yang menempatkan kesehatan sebagai salah satu pilar utama kapabilitas manusia yang menentukan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi jangka panjang. Individu dengan derajat kesehatan yang lebih baik memiliki produktivitas kerja lebih tinggi dan menanggung beban pengeluaran kesehatan yang lebih rendah, sehingga rumah tangga lebih mampu keluar dari kemiskinan. Gambar 4 memperlihatkan bahwa rata-rata AHH pada provinsi sampel meningkat secara bertahap, beriringan dengan penurunan tingkat kemiskinan sepanjang periode penelitian, pola yang mendukung hasil estimasi bahwa perbaikan kondisi kesehatan berasosiasi kuat dengan penurunan kemiskinan.

Secara teoritis, individu dengan derajat kesehatan yang lebih baik memiliki produktivitas kerja lebih tinggi dan mampu bekerja lebih konsisten, sekaligus menanggung beban pengeluaran kesehatan yang lebih rendah, sehingga rumah tangga lebih mampu keluar dari kemiskinan (Novita dan Mahalli, 2013). Arsyad (2016) turut menegaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang, bersama pendidikan, membentuk fondasi kapasitas produktif suatu wilayah. Damayanti, Suhel, dan Bashir (2021) dalam kajiannya mengenai pengaruh kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif turut menemukan bahwa perbaikan indikator kesehatan masyarakat, termasuk angka harapan hidup, berkontribusi signifikan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperkuat relevansi AHH sebagai determinan kemiskinan pada konteks sepuluh provinsi termiskin di Indonesia.

### 3.6.5 Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Gambar 5 Perbandingan Rata-rata PDRB Per Kapita dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sampel Tahun 2015-2024

LnPDRB per kapita menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar  $-0,3679$  dan probabilitas  $0,508$ . Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi termiskin belum mampu menurunkan kemiskinan secara langsung karena manfaatnya belum terdistribusi secara merata (Ranieri dan Ramos, 2013), mencerminkan pertumbuhan yang belum sepenuhnya inklusif. Gambar 5 memperlihatkan bahwa rata-rata PDRB per kapita pada provinsi sampel meningkat cukup tajam sepanjang 2015–2024, sementara tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun; pola pergerakan yang berlawanan arah secara visual ini tidak sepenuhnya konsisten dengan hasil estimasi multivariat, di mana pengaruh LnPDRB terhadap kemiskinan tidak signifikan setelah mengontrol variabel lain.

Falah dan Rahmawati (2024) dalam studinya di Provinsi Jawa Timur turut menemukan bahwa PDRB per kapita tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi daerah tidak diikuti oleh perbaikan indeks pembangunan manusia dan penyerapan tenaga kerja yang memadai, menegaskan bahwa besaran output ekonomi semata bukan jaminan penurunan kemiskinan tanpa disertai kualitas pertumbuhan yang inklusif. Hal serupa juga dikemukakan Bilal dan Doni (2025), yang menyoroti bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia bersifat dua arah dan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ketimpangan pendapatan dapat dikendalikan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi pro-poor growth, pertumbuhan ekonomi yang secara khusus dirancang memberi manfaat lebih besar bagi kelompok miskin, sebagai arah kebijakan yang relevan bagi provinsi-provinsi termiskin Indonesia.

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Gini Rasio, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pendidikan, Angka Harapan Hidup (AHH), dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan pada sepuluh provinsi termiskin di Indonesia selama periode 2015–2024, baik secara parsial maupun secara serentak, menggunakan estimasi Random Effect Model dengan cluster robust standard error. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan kemampuan model menjelaskan 53,41 persen variasi tingkat kemiskinan pada kelompok provinsi ini. Secara parsial, pendidikan dan Angka Harapan Hidup terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, TPAK terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Gini Rasio dan PDRB per kapita tidak terbukti berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi termiskin Indonesia selama satu dekade terakhir lebih banyak ditentukan oleh perbaikan kapabilitas dasar manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan, dibandingkan oleh pemerataan pendapatan maupun besaran pertumbuhan ekonomi daerah, sementara peningkatan partisipasi angkatan kerja pada kelompok provinsi ini justru berasosiasi dengan kenaikan,

bukan penurunan, tingkat kemiskinan, sehingga kuantitas partisipasi kerja semata belum dapat dijadikan indikator perbaikan kesejahteraan tanpa disertai peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan yang tersedia. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di provinsi-provinsi termiskin Indonesia perlu diprioritaskan pada perluasan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan dasar, mengingat kedua faktor tersebut terbukti paling konsisten menurunkan kemiskinan, sementara kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal yang produktif dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, bukan semata pada peningkatan angka partisipasi kerja, dan strategi pertumbuhan ekonomi daerah perlu dirancang agar lebih inklusif dan berorientasi pada kelompok miskin, mengingat besaran PDRB per kapita belum terbukti secara langsung menurunkan kemiskinan pada wilayah-wilayah ini. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lima variabel dan periode sepuluh tahun yang digunakan, sehingga variasi tingkat kemiskinan yang belum dijelaskan oleh model kemungkinan bersumber dari faktor lain yang tidak diikutsertakan, dan penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel, seperti tingkat pengangguran terbuka, realisasi belanja perlindungan sosial, kualitas infrastruktur, atau tata kelola pemerintahan daerah, serta mempertimbangkan pendekatan spasial untuk menangkap keterkaitan kemiskinan antarwilayah yang berdekatan secara geografis.

## Reference

- Afriliana, S. N., & Wahyudi, S. T. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi Antar Provinsi Di Indonesia. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 1(1), 44–57. <https://doi.org/10.21776/Jdess.2022.01.1.5>
- Aimon, H., Kurniadi, A. P., & Satrio, M. K. (2020). Analysis Of Inclusive Growth In Poverty, Unemployment And Income Inequality In West Sumatera Province: Panel Error Correction Model Approach. *Jurnal Benefita*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.22216/Jbe.V5i1.4901>
- Akhmadi, M. (2019). Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp>
- Amanda, F. S., Ananta, P., Maimunah, E., & Sobita, N. E. (2026). Economic Development Strategy Of South Lampung Regency Using The Analytical Hierarchy Process Method. *Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 87–101. <https://doi.org/10.61401/Rabi.V2i2.477>
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis Of Panel Data* (3rd Ed.). John Wiley & Sons.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023: Sinergi Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional*. Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/pages/lpi\\_2023.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/pages/lpi_2023.aspx)
- Bilal, M., & Doni, A. H. (2025). Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Borjuis: Journal Of Economy*, 3(1).
- Damayanti, D., Suhel, S., & Bashir, A. (2021). Pengaruh Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Eriza, A. P., & Emalia, Z. (2026). Paradoks Sumber Daya Alam: Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Ketimpangan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kaya Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 5(10), 136–148.
- Falah, M. A., & Rahmawati, F. (2024). The GRDP Per Capita, Human Development Index, Open Unemployment Rate, Regional Expenditure, And Poverty In East Java Province. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/Jesp.V25i1.21327>
- Febriandika, N. R., Rahayu, C., & Kumar, R. (2022). The Determinant Factors Of Poverty In Eastern Indonesia: Evidence From 12 Provinces. *JEJAK*, 15(2), 283–299. <https://doi.org/10.15294/Jejak.V15i2.36675>
- Fields, G. S. (2019). *Employment And Development*. Oxford University Press.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th Ed.). Mcgraw-Hill.
- Intan, A., Murwati, A., & Wayan, I. (2023). Determinan Kemiskinan Multidimensional 34 Provinsi Di Indonesia Periode Tahun 2015–2018. *Journal On Education*, 6(1), 7674–7683.
- Jalan, J., & Ravallion, M. (2002). Geographic Poverty Traps? A Micro Model Of Consumption Growth In Rural China. *Journal Of Applied Econometrics*, 17(4), 329–346. <https://doi.org/10.1002/Jae.645>
- Klasen, S. (2010). *Measuring And Monitoring Inclusive Growth*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/publications/measuring-and-monitoring-inclusive-growth>
- Manning, C., & Pratomo, D. S. (2013). Do Unions Matter For Wages And Informality In A Developing Country? Evidence From Indonesia. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 49(2), 207–230. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.809842>
- Nabilawaty, R., & Hutajulu, D. M. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015–2020. *Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi*. <http://e-jurnal.ummy-solok.ac.id/ojs/index.php/Jusie/JUSIE>
- Nisa, C. F., Taher, A. R. Y., Ananta, P., & Suparta, I. W. (2025). Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Di 34 Provinsi Indonesia. *E-Journal Field Of Economics, Business, And Entrepreneurship (EFEBE)*, 3(2), 454–466. <https://doi.org/10.23960/Efebe.V3i2.254>
- Ranieri, R., & Ramos, R. A. (2013). *Inclusive Growth: Building Up A Concept* (Working Paper No. 104). International Policy Centre For Inclusive Growth. <https://ipcig.org/pub/ipcworkingpaper104.pdf>
- Sipota, G. J., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2024). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dalam Menurunkan Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(3), 25–36.
- Sobita, N. E., & Suparta, I. W. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 141–166.
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Jayanti, A. D. (2022). Poverty Dynamics In Indonesia: The Prevalence And Causes Of Chronic Poverty. *Journal Of Population And Social Studies*, 30, 423–447. <https://doi.org/10.25133/jpssv302022.025>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2012). *The Contribution Of Economic Growth And Public Service Delivery To Poverty Reduction* (SMERU Working Paper). SMERU Research Institute.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th Ed.). Pearson Education.
- Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric Analysis Of Cross Section And Panel Data*. MIT Press.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12872>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects, December 2023: Climate Action For Development. World Bank.  
[https://Documents1.Worldbank.Org/Curated/En/099121223055535475/Pdf/P1795560392d6007309c360819c51cc5979.Pdf](https://documents1.Worldbank.Org/Curated/En/099121223055535475/Pdf/P1795560392d6007309c360819c51cc5979.Pdf)